



KEPAHIANG

KAMIS, 16 JUNI 2022

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Selesaikan Temuan Rp 1,4 M Sebelum 11 Juli

KEPAHIANG - Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepahiang, Ir. Taufik optimis pihaknya mampu menyelesaikan temuan BPK atas 11 proyek pembangunan dari dana hibah BNPB tahun anggaran 2020 lalu sebesar Rp 1,4 miliar tersebut sebelum 11 Juli mendatang. Ini disampaikan Taufik usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kabupaten Kepahiang beberapa waktu lalu.

Menurutnya secara teknis pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan tindak lanjut atas temuan BPK tersebut, dan ia optimis sebelum masa 60 hari yang diberikan BPK untuk penyelesaian temuan, seluruhnya bisa dituntaskan.

"Sampai hari ini dari jumlah Rp 1,4 miliar tersebut, hampir 10 persen diantaranya sudah diselesaikan. Dan selanjutnya kita akan mengejar semua penyelesaiannya, dan mudah-mudahan sebelum 11 Juli mendatang sudah selesai," jelas Taufik.

Diakui Taufik, seluruh paket pekerjaan dari dana hibah BNPB senilai Rp 22 miliar tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK beberapa waktu lalu memang terdapat temuan, mulai dari temuan keselamatan kesehatan kerja

(K3), hingga temuan lainnya seperti kelebihan pembayaran atas pekerjaan.

"Intinya kita siap menyelesaikan seluruh temuan tersebut. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita dalam mengelola keuangan Negara," tegas Taufik.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepahiang, Ansori M mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama BPBD, pihaknya meminta pihak BPBD agar bisa menyelesaikan semua temuan tersebut secepat mungkin. Karena ada kelebihan pembayaran dalam pekerjaan proyek tersebut.

"Selain itu juga, berkaca pada kejadian ini, kami meminta kepada Pemkab Kepahiang untuk kedepannya bisa lebih selektif lagi dalam memilih pihak rekanan untuk mengerjakan proyek pembangunan," ujarnya.

Politisi Golkar tersebut mengatakan, hasil audit BPK ini kedepan harus menjadi evaluasi bagi BPBD Kabupaten Kepahiang dalam memilih pihak ketiga sebagai rekanan. Jangan sampai kedepan kembali terjadi temuan dalam setiap proyek pembangunan yang dikerjakan.

"Jangan sampai jadi temuan lagi kedepannya, pilihlah rekanan yang profesional, bonafit, dan

memiliki peralatan yang lengkap. Jangan sampai asal-asalan melaksanakan pekerjaan, karena ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat," jelas Ansori.

Diketahui sebelumnya, pada tahun 2021 lalu BPBD Kepahiang mendapatkan hibah dari BNPB sebesar Rp 22,3 miliar dan dipergunakan untuk pembangunan 11 unit pekerjaan fisik di Kepahiang. Rincian pembangunan yang dilakukan berupa jembatan dan pelapis tebing serta drainase yang tersebar di 3 kecamatan, yakni, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Bermani Ilir.

Kecamatan Ujan Mas pembangunan fisik Pelapis tebing dan drainase jalan ruas Simpang Desa Bumi Sari-batas Kabupaten Rejang Lebong (RL), jembatan gantung di Ujan Mas, jembatan gantung di Air Hitam, jembatan gantung Daspetah II, jembatan Gantung Desa Tanjung Alam.

Untuk di Kecamatan Kepahiang berupa jembatan Gantung Desa Pagar Gunung, jembatan gantung Desa Pelangkian, jembatan Beton Kelurahan Dusun Kelurahan Dusun Kepahiang, jembatan Beton Desa Taba Tebelet. Dalam Kecamatan Bermani Ilir tepatnya pembangunan jembatan gantung Desa Talang Pito. (sly)